

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hubungan luar negeri dalam bentuk kerja sama internasional merupakan tuntutan bagi setiap negara. Kebijakan luar negeri dianggap sebagai *domain* pemerintah pusat yang merepresentasikan negara. Di Indonesia, meningkatnya peran aktor non-negara khususnya aktor subnasional dalam hubungan internasional pertama kali didorong oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur perluasan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri. Selanjutnya perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tetap tetap menjamin kewenangan daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri. Sekarang ini telah banyak pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang menjalin kerjasama luar negeri, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Praktek kerjasama antara pemerintah daerah di Indonesia dengan mitranya di luar negeri ditujukan dalam kerangka otonomi daerah yang memicu daerah untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri. Secara sederhana dapat dikatakan praktek ini untuk mendukung kepentingan daerah, menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan dan untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

Hubungan Luar Negeri dan Undang- Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. (Darmayadi, 2022). Salah satu bentuk kerja sama dan kemitraan adalah kerja sama *Sister Province*, dimana daerah, dengan mempertimbangkan potensinya dapat melakukan kerja sama dengan provinsi di negara lain, untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemilihan mitra kerja sama dari luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan, diantaranya kesetaraan status administrasi, kesamaan karakteristik, kesamaan permasalahan, upaya saling melengkapi dan peningkatan hubungan antar masyarakat, serta adanya kepentingan lain seperti perdagangan dan alih teknologi, yang dirasa belum cukup terakomodasi jika kerja sama dilakukan dengan pihak-pihak lain dalam tataran domestik.

Provinsi Jawa Tengah juga mengikuti cara yang sama dalam melakukan kerjasama dan diplomasi dengan luar negeri. Salah satu kegiatan yang paling berpengaruh adalah adanya *Sister Province* (Djegadut, 2021). *Sister Province* merupakan kerjasama antara tingkat provinsi dari satu negara ke negara lain (Pemotdaker Jateng, 2019). Berdasarkan situs resmi Biro Pemerintahan, Otda, dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki 5 *Sister Province* yang berada di Australia, Kamboja, Cina, Korea Selatan, dan Rusia. Indonesia khususnya Jawa Tengah memiliki *Sister Province* dengan Sverdlosk, Rusia sejak tahun 2017 (Pemotdaker Jateng, 2019). Sesuai hasil *Minutes of Meeting* (MoM) yang ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2017 di

KBRI di Moskow antara Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur Sverdlovsk disaksikan oleh Duta Besar RI di Moskow, memberikan sambutan bahwa Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sverdlovsk memiliki banyak kesamaan yang apabila dapat dikerjasamakan akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak untuk pembangunan kedua provinsi/wilayah ke depan. Potensi yang dapat dikerjasamakan adalah di bidang perdagangan, pariwisata, investasi, pendidikan, budaya, energi, dan kesehatan.

Selanjutnya, bentuk kerjasama antara Provinsi Jawa Tengah dalam *sister province* dengan Rusia tersebut adalah kerjasama perdagangan atau kerjasama *Business to Business* (B to B). Gubernur Jawa Tengah beserta delegasi pengusaha dari Jawa Tengah melakukan 10 (sepuluh) perjanjian kerjasama investasi dan dagang dalam Indonesia - Rusia *Business Forum* di Moscow, Rusia. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan MoU antara pengusaha Jateng dan Rusia di Ritz Carlton Hotel Moscow, hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019. Namun, pada saat masa kerjasama ini berlangsung, Rusia menghadapi konflik dengan Ukraina.

Munculnya konflik antara Rusia dan Ukraina di bulan November 2021 telah mengguncang Politik Global dan pasar internasional dan berdampak pada Krisis Global. Akibat dari konflik ini berpotensi berdampak pada ekonomi di seluruh dunia semisal Pasar Minyak, gas, gandum, energi, makanan, dan pupuk global (Rakhmayanti 2022). Rusia termasuk produsen dan pengeksport minyak terbesar ketiga di dunia, pengeksport gas bumi terbesar kedua, dan pengeksport batubara terbesar ketiga. Rusia juga merupakan pengeksport gandum terbesar di dunia. Selain

itu, Rusia juga mendominasi perdagangan pupuk global dan menjadi pengeksport pupuk terbesar (Bakrie, 2022). Krisis yang terjadi tentunya berimbas kepada bidang Ekonomi dan tentu konflik tersebut menimbulkan restrukturisasi perdagangan internasional, Meskipun tidak diketahui kapan restrukturisasi ini akan terjadi. Akan tetapi negara yang memiliki hubungan antara kedua negara ini akan memiliki pengaruh besar terhadap Kepentingan Nasional (Bakrie, 2022).

Hubungan perekonomian antara negara di seluruh dunia memiliki pengaruh yang sama atas Perang Rusia – Ukraina dan salah satunya negara di Kawasan Asia Tenggara. Bahkan secara signifikan akibat dari perang ini mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia, kenaikan harga komoditas seperti Minyak Bumi, Gas Bumi, dan hasil pertambangan yang dikenakan kepada seluruh dunia. Kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang bergantung terhadap Rusia dalam komoditas Minyak Bumi selain letak Geografisnya yang tidak terlalu jauh dibandingkan dengan Amerika Serikat. Rusia menjadi salah satu yang memiliki peran di Kawasan Asia Tenggara, Hubungan perekonomian dan militer Rusia memiliki ketertarikan dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Indonesia, dan Thailand (Crystallin dalam Guntur 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah diatas, penelitian ini akan menjelaskan “Bagaimana langkah yang diambil Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Sverdlovsk dalam kerjasama perdagangan saat konflik Rusia dan Ukraina?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk melakukan penelitian bagaimana langkah Pemerintahan Jawa Tengah dalam menangani kerjasama perdagangan dengan Provinsi Sverdlovsk Rusia di masa konflik Rusia – Ukraina.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus yaitu menganalisis :

1. Pelaksanaan Kerjasama perdagangan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Sverdlovsk Rusia.
2. Dampak konflik Rusia – Ukraina dalam hal kerjasama perdagangan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Sverdlovsk Rusia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktik yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini memiliki kegunaan akademis yaitu memberikan kontribusi dalam ilmu Hubungan Internasional dengan fokus penelitian pada Teori Paradiplomasi yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan dalam segi praktisnya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan

masyarakat dalam kebijakan kerjasama perdagangan di era konflik Rusia – Ukraina.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Literature Review

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki mitra kerjasama yang cukup banyak dan luas dengan Rusia. Kemajuan kota-kota di Jawa Tengah, bahkan Kota Magelang yang sudah berhasil menjadi *sister city* pada salah satu kota di Rusia yaitu Tula, merupakan bukti komitmen dan konsistensi kedua negara dalam bekerjasama (Prokonmpim, 2022). Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Sverdlovsk telah sepakat untuk bekerjasama dengan LoI (*Letter of Intent*) pada 2017 (Pemotdaker Jateng, 2019). Sektor perdagangan menjadi yang paling pesat dan progresif perkembangannya, sisanya adalah pendidikan.

Berikutnya akan dijabarkan 7 (tujuh) jurnal atau literatur untuk memberikan gambaran dari penelitian ini selanjutnya. Literatur pertama yang berjudul “*Analysis of Investment Increase Contribution to GRDP in 2020 Central Java Province*” karya Dyfan Jaya (2020), Tony Kwok dan Feryanto Marcus. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang membahas mengenai perkembangan nilai GRDP Jawa Tengah yang sangat dipengaruhi dengan investasi domestik dan luar negeri. Baik dari PMA (Penanaman Modal Asing) atau PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Jawa Tengah selalu bergerak sejajar, perbedaan drastisnya

saat pandemi Covid-19 mulai menyebar dan menyebabkan PMA Jawa Tengah turun dari 40.85 triliun rupiah menjadi 19.64 triliun rupiah (Jaya et al., 2021).

Khairi, Naufal Fikhri (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Layu Sebelum Berkembang: Studi Kasus Kerjasama Sister City Malang dengan Fuqing dalam Komoditas Kedelai”. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori Paradiplomasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah menjalin kerjasama *sister city* dengan Kota Fuqing terkait impor kedelai, namun gagal karena Amerika Serikat masih memonopoli mayoritas kedelai impor di Indonesia, salah satunya di Kota Malang. Berdasarkan kegagalan kerjasama ini diketahui bahwa permasalahan kedelai impor bukan merupakan hal yang mudah untuk diselesaikan atau mencari alternatif lain termasuk kualitas kedelai dari Malang yang kurang memenuhi pasar di Amerika Serikat. Peneliti menyarankan sebelum melakukan kerjasama, seharusnya Pemerintah Kota Malang melakukan kajian akademik terhadap kebijakan tersebut, sehingga dapat kebijakan kerjasama mendapatkan kepastian akademik, tepat sasaran, dan lebih terarah.

Sedangkan Renyanthi, Geraldine (2020), melakukan kajian tentang “Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri (Perspektif Hukum Administrasi Negara)”. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori hukum administrasi negara. Hasil penelitian menyimpulkan pentingnya Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri sebagai upaya untuk mewujudkan implementasi asas desentralisasi serta proses

pelaksanaan urusan konkuren yang dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat. Regulasi hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri sudah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut selain sebagai dasar hukum kerja sama, agar kerja sama yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri bisa benar-benar membawa manfaat yang nyata bagi negara, terutama bagi daerah yang melaksanakannya.

Jurnal yang berjudul “Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui *Sister Province* dengan Republik Bashkortostan Rusia” dengan metodologi penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Teori penelitian yang digunakan adalah teori Paradiplomasi. Hasil penelitian oleh Darmayadi, Andrias (2022) menyimpulkan bahwa Republik Bashkortostan dengan beragam potensinya dapat diharapkan memberikan dorongan terhadap Jawa Barat untuk menjadi sentra teknologi baik secara domestik atau nasional maupun di tingkat kawasan/ *ASEAN termasuk* investasi. Peneliti memberikan saran atas kerjasama tersebut (1) memperkuat kapasitas Industri, Jawa Barat dapat mengirimkan Insinyur-insinyur baik itu dari industri manufaktur, penerbangan, petrokimia, militer untuk belajar ke Bashkortostan. (2) Jawa Barat hendaknya dapat mengajak dunia akademik dan riset untuk bagaimana bersama-sama memacu peningkatan kapasitas. (3) diperlukan kerja sama dalam pengelolaan dan pengendalian limbah perindustrian yang mencemari lingkungan dan memulihkan kondisi sungai yang ada di Jawa Barat, (4) Transfer ilmu dan teknologi dalam pengelolaan dan pemberdayaan lahan agrikultur

mengingat Republik Bashkortostan dan Provinsi Jawa Barat memiliki masalah yang sama; (5) Kerjasama Pariwisata dapat dilakukan dengan pemasaran bersama (*joint marketing*) dalam mempromosikan tempat wisata yang ada di daerah masing-masing.

Fathun, Laode Muhamad (2016) dalam jurnalnya “Paradiplomasi menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar” dengan metodologi penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Teori penelitian yang digunakan adalah teori Paradiplomasi. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan Makassar sebagai salah satu kota yang telah mengimplementasikan paradiplomasi untuk membentuk *smart city* dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yang dicirikan oleh integritas, akuntabilitas, dan transparan. Program smart city di Makassar merupakan program strategis yang mendapat pujian dari sejumlah pihak khususnya Konsulat Amerika Serikat. Praktek *smart city* di Makassar yang melibatkan para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri merupakan usaha Pemerintah Kota Makassar untuk menciptakan kota yang lebih modern. Adanya ketersediaan *wifi* gratis, CCTV, *e-KTP*, *e-Office*, *e-restoran*, *e-karcis* dan lain-lain merupakan langkah strategis menciptakan *smart city*.

Bakrie, Connie Rahakundini (2022) dalam artikelnya berjudul “Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik sehingga peneliti tidak hanya menjelaskan pengaruh perang antara Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian Asia Tenggara, tetapi juga

menganalisis hubungan ekonomi antara negara-negara Asia Tenggara dengan Rusia. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa pada tahun 2017, Rusia menduduki peringkat kedelapan di antara mitra dagang utama ASEAN, dengan total perdagangan bilateral hanya 0,66% dari total omset perdagangan ASEAN. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tentunya berdampak pada sektor ekonomi dan tentunya konflik tersebut berujung pada restrukturisasi perdagangan internasional dan negara-negara yang memiliki hubungan dengan Rusia dan Ukraina akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kepentingan nasional negaranya. Asia Tenggara merasakan efek langsung dari perang seperti gangguan rantai pasokan global dan kenaikan harga energi dan pangan. Kenaikan harga BBM di beberapa negara. Hal ini membuat dampak perang antara Rusia dan Ukraina mendapat pengaruh yang besar dari berbagai sektor sehingga menyebabkan terjadinya restrukturisasi ekonomi global.

Literatur selanjutnya yang berjudul “Analisis Dampak Konflik RUSIA–UKRAINA terhadap Harga Bahan Bakar Minyak Indonesia” oleh Dimasti Dano (2022), dengan metodologi kualitatif deskriptif. Jurnal ini menjelaskan bagaimana konflik yang kembali panas, antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak besar terutama pada ekspor minyak gas dunia. Bagi Indonesia sendiri, konflik ini memiliki dampak yang besar karena kenaikan harga minyak gas yang disebabkan kondisi Rusia yang sedang berfokus pada konflik tersebut. Sehingga potensi inflasi sangat besar yang disebabkan oleh 2 hal yaitu, kenaikan harga komoditas terhadap

Rupiah dan penetapan harga bensin eceran dipegang oleh pemerintah, dimana pasti ada kenaikan harga (Dano, 2022).

Berdasarkan 7 (tujuh) literatur yang sudah dibahas, maka akan dipaparkan tabel untuk mempermudah pembaca di bawah ini:

Tabel 1
Literature Review

No	Judul	Nama Penulis	Uraian
1	<i>Analysis Of Investment Increase Contribution To Grdp In 2020 Central Java Province</i>	Dyfan Jaya Tony Kwok dan Feryanto Marcus (2020),	Menjelaskan nilai GRDP Jawa Tengah sangat dipengaruhi dengan investasi domestik dan luar negeri, baik PMA atau PMDN di Jawa Tengah. Pada saat pandemi Covid-19 menyebabkan PMA Jawa Tengah turun dari 40.85 triliun rupiah menjadi 19.64 triliun rupiah
2	Layu Sebelum Berkembang: Studi Kasus Kerjasama Sister City Malang Dengan Fuqing Dalam Komoditas Kedelai	Naufal Fikhri Khairi (2021)	Menyimpulkan bahwa kegagalan Pemerintah Kota Malang dalam kerjasama <i>sister city</i> dengan Kota Fuqing terkait impor kedelai. Kegagalan kerjasama ini disebabkan permasalahan kedelai impor karena kualitas kedelai dari Malang yang kurang memenuhi pasar di Amerika Serikat.
3	Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Dan Pihak Luar Negeri (Perspektif Hukum Administrasi Negara)	Geraldine Renyanthi (2020)	Menjelaskan pentingnya Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat berdasarkan regulasi sebagai dasar hukum kerja sama, agar kerja sama yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri membawa manfaat yang nyata bagi daerah dan negara.

4	Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Melalui Sister Province dengan Republik Bashkortostan Rusia	Andrias Darmayadi dan Sylvia Octa Putri, 2022	Menjelaskan kerjasama Jawa Barat dengan Republik Bashkortostan dapat diharapkan memberikan dorongan terhadap Jawa Barat untuk menjadi sentra teknologi baik secara domestik atau nasional maupun di tingkat kawasan/ASEAN termasuk investasi.
5	Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar	Laode Muhammad Fathun, 2016	Menyimpulkan keberhasilan Makassar sebagai salah satu kota yang telah mengimplementasikan paradiplomasi untuk membentuk <i>smart city</i> . Program smart city di Makassar melibatkan para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri merupakan usaha Pemerintah Kota Makassar untuk menciptakan kota yang lebih modern.
6	Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara	Connie Rahakundini Bakrie, Mariane Olivia Delanova, dan Yanyan M. Yani; 2022	Menyimpulkan bahwa perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina berdampak pada sektor ekonomi dan restrukturisasi perdagangan internasional dan negara-negara yang memiliki hubungan dengan Rusia dan Ukraina akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kepentingan nasional negaranya. Asia Tenggara merasakan efek langsung dari perang seperti gangguan rantai pasokan global dan kenaikan harga energi dan pangan.
7	Dampak Konflik Rusia – Ukraina Terhadap Pariwisata Rusia	Ni Made Prasiwi Bestari, Sukma Sushanti, dan A.A Bagus Surya Widya Nugraha; 2022	Menjelaskan konflik yang Rusia dan Ukraina memiliki dampak besar terutama pada ekspor minyak gas dunia. Bagi Indonesia sendiri, konflik ini memiliki dampak yang besar karena

			kenaikan harga minyak gas yang disebabkan kondisi Rusia yang sedang konflik. Sehingga ada potensi inflasi sangat besar yang disebabkan oleh 2 hal yaitu, kenaikan harga komoditas terhadap Rupiah dan penetapan harga bensin eceran dipegang oleh pemerintah.
--	--	--	---

Dari ketujuh penelitian tersebut, penulis mengambil garis besar bahwa konflik internasional seperti Rusia dan Ukraina dapat memiliki pengaruh yang besar. Kerjasama antara Indonesia dan Rusia sudah pasti akan memiliki dampak atas konflik tersebut, yang akan dijabarkan penjelasannya menggunakan Teori Diplomasi *Multi Track* dan Konsep Paradiplomasi untuk menjabarkan kinerja Pemda Jawa Tengah dalam merespon konflik Rusia dan Ukraina terhadap kerjasama yang telah terbentuk.

1.5.2 Kerangka Berpikir

Teori Diplomasi *Multi Track* Hubungan kerjasama yang terjalin oleh banyak negara tidak hanya terbentuk karena satu langkah saja, terdapat langkah-langkah lain dan dalam sektor-sektor tertentu sehingga kerjasama dapat diwujudkan. Teori Diplomasi *Multi Track* menunjukkan bahwa dunia internasional lebih luas dari yang kita pikirkan, sebuah proses luas untuk melihat koneksi antar negara sebagai sebuah *living system* (Myer, 2015). Diplomasi *Multi Track* terwujud karena sebuah negara atau pemerintahan saja, belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan internasional. Sebuah peristiwa jatuhnya Tembok Berlin pada 1989

menunjukkan kepada dunia internasional bahwa aktor-aktor *non-government* atau *non-state actor* dapat membantu mewujudkan perdamaian dunia (Sagena, 2019).

Teori Diplomasi *Multi Track* atau istilah MTD (*Multi Track Diplomacy*) dicetuskan oleh Joseph Montville, seorang diplomat yang mengatakan bahwa diplomasi lewat antar negara atau pemerintah (*governmental*) merupakan *track one* dari MTD. Lalu Joseph Montville menyatakan perlunya *track two* yang melibatkan *non-state actors* atau non-pemerintah (Myer, 2015). Selanjutnya, respon salah satu duta besar AS, John Mcdonald menyatakan bahwa istilah *multi* seharusnya tidak hanya 2 aspek saja. Selanjutnya, John Mcdonald memperluas aspek dari MTD ini hingga mencapai *track nine*, sehingga akhirnya John Mcdonald menegaskan diplomasi yang bersifat multilevel harus mencakup dan memediasi segala aspek dan level masyarakat (Syed, 2020).

Berikut 9 (sembilan) *tracks* dalam *Multi-Tracks Diplomacy*, akan dijelaskan di bawah ini:

1. **Track One** atau yang disebut *Government Track* dimana institusi resmi dan lembaga pemerintahan menjadi aktor utama, baik legislatif, eksekutif atau yudikatif. Tingkat keterlibatan ini melibatkan perwakilan resmi pemerintah, seperti duta besar, menteri luar negeri, dan pejabat tinggi lainnya, yang terlibat dalam pembicaraan dan negosiasi diplomatik formal untuk mengatasi masalah atau konflik tertentu.
2. **Track Two** atau yang disebut *Non-Government Track* memiliki aktor utama yaitu lembaga non-pemerintah atau NGO (*Non-Governmental Organization*).

Interaksi dan aktivitas ini terjadi di luar hubungan resmi antar pemerintah (*Track One* atau *Government Track*) dan bersifat lebih informal dan personal. Diplomasi ini sering kali digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dengan membangun kepercayaan, dan mendorong kerja sama dalam isu atau konflik tertentu, terutama dalam situasi di mana saluran diplomatik formal belum efektif.

3. **Track Three** atau yang disebut *Busines Track* memiliki aktor utama pelaku bisnis, dimana aktivitas *B to B (Business to Business)* menjadi hal yang sering dilakukan. Pada *track* ini, perdamaian bisa diwujudkan dengan kerjasama bisnis, dengan begitu masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari diplomasi *B to B* ini untuk mengurangi kesenjangan sosial.
4. **Track Four** atau *Citizen Track* ini meliputi kegiatan yang dilakukan oleh para individu atau masyarakat dalam mewujudkan perdamaian di dunia. Diplomasi *track four* memiliki ciri khas oleh sifat yang lebih informal dan personal, seringkali melibatkan keterlibatan langsung antara entitas sektor swasta dan individu dari berbagai sektor untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama.
5. **Track Five** atau *Research and Education Track* memiliki fokus dalam perwujudan perdamaian melalui akademisi dan observasi. Diplomasi pada *track* ini berfokus pada pendidikan dimana kerjasama dan perdamaian dapat diciptakan melalui para akademisi yang bersifat *Think Tanks*, mediasi dan pembelajaran teknik dan etika dalam bernegosiasi, serta program pendidikan bersama pada berbagai jenjang dan kurikulum yang diajarkan.

6. **Track Six** atau yang disebut *Activism Track* merupakan diplomasi yang memiliki aktor utama komunitas dan pergerakan aktivis. Pada kasus tertentu, diplomasi yang menggunakan *track six* ini memiliki ciri khas dan tujuan untuk mewujudkan HAM dengan gerakan aktivis HAM, serta kelompok ini juga memiliki taktik khusus dalam memperjuangkan keinginan-keinginan yang ingin diwujudkan, yakni melalui advokasi.
7. **Track Seven** atau *Religious Track* merupakan jalur diplomasi yang mengutamakan keagamaan atau kepercayaan tertentu untuk mewujudkan perdamaian dunia. Secara sekilas, agama dipandang hanya sebagai dasaran iman dan pengayom masyarakat. Namun, pada *track* ini percaya bahwa para pemuka agama memiliki peran yang penting terutama pada kasus konflik komunal, yang mengatasnamakan agama sehingga pemuka agama akan lebih dipandang oleh masyarakat.
8. **Track Eight** atau yang disebut dengan *Funding Track* dimana aktor utamanya adalah para donatur dan kelompok filantropis, yang siap mendanai kegiatan apapun untuk mewujudkan perdamaian. Kelompok donatur ini sering dilibatkan dalam kegiatan HAM dan *Gender Equality*, penanggulangan korban perang dan isu lingkungan hidup.
9. **Track Nine** atau yang disebut dengan *Media Track* memiliki aktor utama berupa kelompok media massa. Pada *track* ini, media memegang peran utama dimana sebuah perdamaian dapat dipengaruhi bagaimana media membawa sebuah informasi kepada masyarakat. Ada masa dimana media menjadi pihak

yang dapat mewujudkan perdamaian, ada juga dimana media dapat memicu percikan api dengan menyebarkan provokasi. Dari situlah, *track* ini menjelaskan seberapa krusial media berpengaruh dalam mewujudkan perdamaian (Diamond & McDonald, 1996).

Konsep Paradiplomasi Salah satu bentuk diplomasi adalah paradiplomasi, yang berfokus pada *non-state government* atau yang bisa disebut sebagai Pemerintah Daerah. Konsep ini dikembangkan untuk memberi jalan kepada aktor-aktor regional dalam mewujudkan perdamaian internasional. Hal ini terlihat kontras dengan konsep *Westphalian* yang memusatkan kekuatan diplomasinya pada *state actor* (Raterjee, 2017). Paradiplomasi mulai berkembang pesat berawal dari pasca Perang Dunia II, dimana pemerintah daerah Perancis menghubungi pemerintah daerah Jerman dengan menggabungkan perjanjian bersama untuk membangun rekonstruksi pasca perang, khususnya di Eropa Barat.

Pencetus konsep paradiplomasi, Panayotis Soldatos pada 1990 mendefinisikan paradiplomasi sebagai sebuah “*direct continuation*” atau keberlanjutan yang sejalan dengan keberagaman level (Paquin, 2004). Level yang dimaksud adalah tingkatan aktor-aktor dalam menjalankan kegiatan diplomasi. Kata “para-“ sebelum diplomasi diambil dari kata parallel, yang diartikan sebagai sebuah 2 hal yang berbeda namun sejalan. Konsep paradiplomasi memungkinkan menghasilkan kebijakan atau kerjasama yang berbeda dengan kebijakan yang dijalankan oleh *state actors* sebagai aktor utama sebuah negara, namun tetap sejalan

untuk mewujudkan hubungan antar pemerintah daerah yang kooperatif, sehingga sama-sama menguntungkan kedua negara (Paquin, 2004).

De Villiers (2003), seorang elit politik asal Afrika Selatan menyatakan bahwa kegiatan paradiplomasi ini bisa menciptakan yang disebut dengan *global governance*, sebuah aktivitas dimana pemerintah daerah memainkan peran internasional untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah atau provinsi di negara lain (Darmayadi, 2022). Fokus dari diplomasi ini dipegang oleh pemerintah daerah atau lokal, dengan bekerjasama dengan pihak luar seperti investasi asing antar sub-regional dan penjajakan *sister province* (Putra et al., 2021).

Paradiplomasi dibentuk dalam konsep negara yang lebih maju *non-state actors* dan menjadi suatu lembaga yang dapat terlibat dalam pelaksanaan hubungan internasional dengan membentuk hubungan transnasional dalam bermacam usaha baik dari segi budaya, ekonomi, maupun lingkungan. Keseragaman identitas dan kepentingan yang serupa dapat menyebabkan formalisasi hubungan NGO serta *non-state actors*. Paradiplomasi menjadi bukti bahwa tidak hanya negara yang berkembang, namun *non-state actors* juga telah berkontribusi dalam praktik diplomasi. Paradiplomasi juga merupakan gabungan dari paralel dan diplomasi yang diartikan sebagai sebuah kekuasaan untuk dapat melakukan interaksi luar negeri dengan negara lain yang telah dilakukan oleh sub-state actor. Paradiplomasi akan terus bertumbuh sebagai suatu gambaran kegiatan internasional yang dilakukan oleh sub-state actor, pemerintah regional maupun pemerintahan lokal guna mempromosikan kepentingan mereka.

Paradiplomasi dibagi menjadi 4 (empat) macam jenis, yaitu :

a) *Ceremonial Paradiplomacy*

Paradiplomasi seremonial tertuju pada beberapa daerah yang sangat berfokus pada pembangunan masyarakat dalam melakukan interaksi eksternal, sebagaimana perjanjian Sister City, yang merupakan bentuk kolaborasi yang dibuat antara pemerintah subnasional di wilayah yang berbeda secara geografis dan politik untuk mempromosikan hubungan budaya. Gerakan *town-twinning* telah berkembang setelah kejadian Perang Dunia II yang sejalan dengan perkembangan yang dicapai oleh proses integrasi Eropa. Program town-twinning bergantung pada perjanjian sukarela warga yang berkolaborasi dengan otoritas local dan asosiasi local yang merupakan tanda intensif untuk partisipasi aktif, serta memajukan pertukaran pengalaman mengenai bermacam isu yang menjadi kepentingan bersama.

b) *Single Themed Paradiplomacy*

Single Themed Paradiplomacy yaitu hanya tertuju pada satu fokus kerja sama dengan isu-isu spesifik seperti lingkungan dan ekonomi.

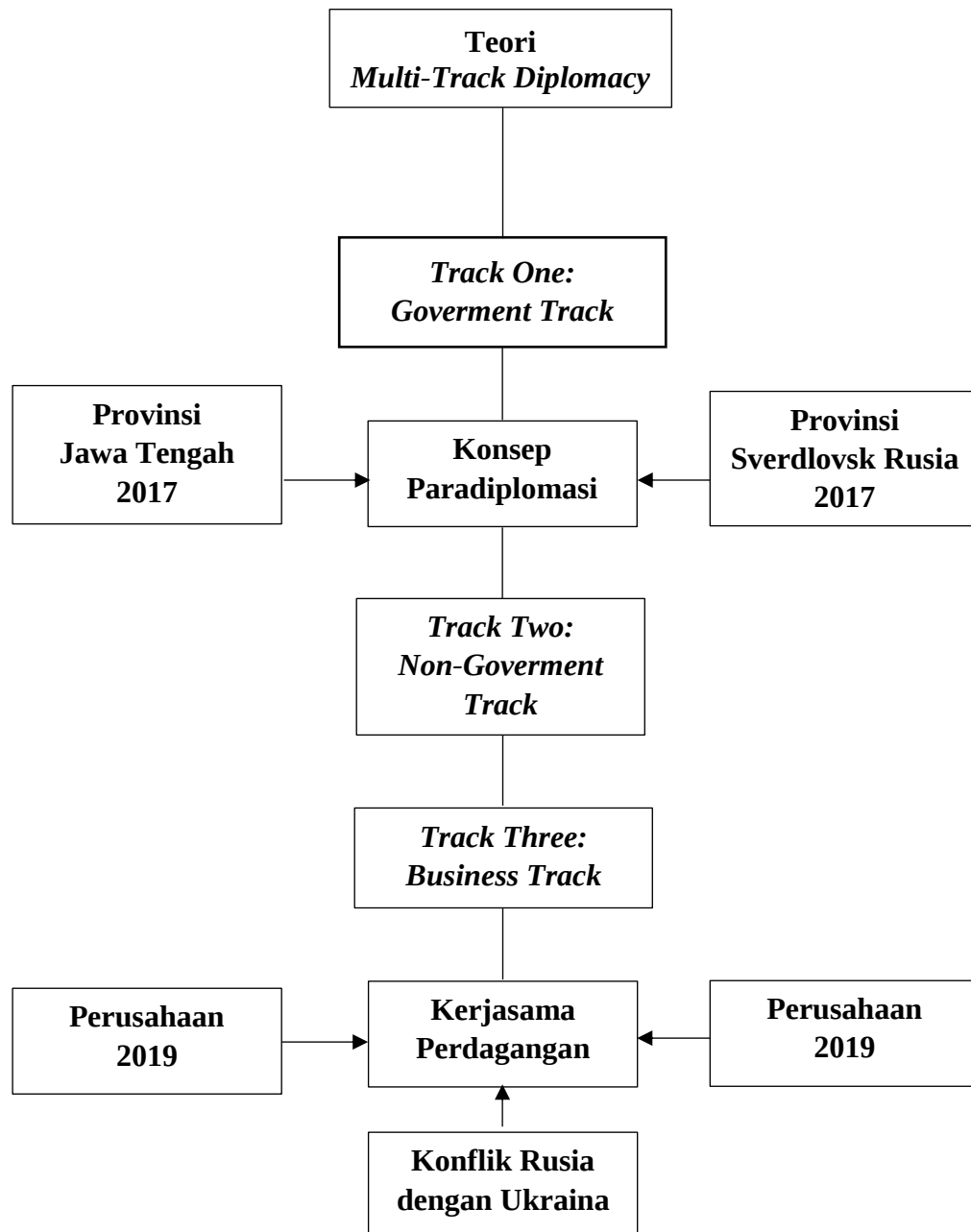
c) *Global Paradiplomacy*

Global Paradiplomacy memiliki jangkauan kerjasama yang lebih luas, karena terlibat secara internasional dengan bermacam kepentingan serta agenda, dengan perjanjian kerjasama dalam bermacam bidang dari lingkungan hingga budaya dan infrastruktur serta perdagangan.

d) *Sovereign Paradiplomacy*

Paradiplomasi disebut juga sebagai “Protodiplomacy” yang merupakan suatu istilah yang mengacu pada keberlaksanaan hubungan internasional oleh pemerintah non-pusat dengan capaian untuk membangun negara yang berdaulat. Protodiplomacy menggantikan persiapan diplomatik untuk pemisahan diri di masa depan dan untuk mendapat pengakuan diplomatik, namun Protodiplomacy sering dianggap tidak sah dan berisiko bagi integritas negara.

Berdasarkan 4 (empat) macam jenis Paradiplomasi yang telah dijelaskan, penelitian ini merujuk pada *Single Themed Paradiplomacy* yang pada dasarnya berfokus pada kerjasama B to B (*Business to Business*) yang terjalin antara para Pengusaha Jawa Tengah yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Rusia dalam hal kerjasama perdagangan.

Bagan 1. Kerangka Pemikiran

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Konsep Diplomasi *Multi Track*

Dari penjelasan para ahli yang sudah disebutkan, penulis mendefinisikan Konsep Diplomasi *Multi Track* berdasarkan pada pernyataan Joseph Montville, dimana kegiatan diplomasi diperlukan di berbagai sektor dan level untuk mencakup semua aktor yang berada pada sebuah negara. Joseph Montville menyebutkan diplomasi yang berpusat pada pemerintahan negara merupakan *track one diplomacy*, selanjutnya ada *track two (non-government)*, *track three (Business)*, *track four (private citizen)*, *track five (research, training, and education)*, *track six (activism)*, *track seven (religious)*, *track eight (funding)*, dan *track nine (communication and media)*. Penelitian akan menggunakan 3 (tiga) *track*; *Government*, *Non-Government*, dan *Business*. Dari ketiga *track* tersebut, akan dianalisis berdasarkan langkah pemerintahan, selanjutnya oleh pihak-pihak non-pemerintah khususnya bagi pelaku bisnis, sehingga diharapkan dapat menemukan dampak apa saja yang berdampak pada para pelaku bisnis terhadap kerjasama perdagangannya dengan Rusia.

1.6.1.2. Konsep Paradiplomasi

Penelitian ini akan menggunakan Konsep Paradiplomasi yang berdasarkan definisi dari Panayotis Soldatos, sebuah diplomasi yang baik adalah diplomasi yang *multi-level*. Konsep Paradiplomasi akan berfokus pada *sub-regional* atau pemerintah daerah yakni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi

Sverdlovsk Rusia Tahun 2017 , yang ditindaklanjuti dengan MoU kerjasama perdagangan (*Business to Business*) antara Pengusaha Pengusaha di Jawa Tengah dan pengusaha-pengusaha dari Rusia tanggal 1 Agustus 2019.

1.6.2. Definisi Operasional

Pada bagian ini, akan disampaikan definisi operasional berdasarkan definisi konseptual yang telah dijelaskan:

1.6.1.1. Konsep Diplomasi *Multi Track*

Konsep ini melandasi bagaimana penulis menggunakan *track three diplomacy*, salah satu bagian dari Diplomasi *Multi Track* yang berfokus pada *B to B*. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis sektor perdagangan yang dijalankan oleh aktor-aktor dan kemitraan bisnis yang sudah terjalin antara Jawa Tengah dengan Rusia.

1.6.1.2. Konsep Paradiplomasi

Pemda Jawa Tengah telah menyetujui LoI bersama dengan Provinsi Sverdlovsk pada 2017, sehingga konsep Paradiplomasi menjadi landasan untuk menganalisis sikap dan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap konflik yang tengah Rusia hadapi. Selanjutnya bagaimana tindaklanjut MoU kerjasama perdagangan (*Business to Business*) antara Pengusaha Pengusaha di Jawa Tengah dan pengusaha-pengusaha dari Provinsi Sverdlovsk Rusia tanggal 1 Agustus 2019.

1.7 Argumen Penelitian

Kerjasama perdagangan antara kedua pemerintah daerah di dua negara berjalan dengan baik dan lancar. Sesuai data dari BPS menyebutkan bahwa pencatatan nilai ekspor dari Jawa Tengah ke Rusia mengalami tren kenaikan. Tahun 2017 sebesar 23 juta dolar Amerika naik menjadi 30 juta dolar Amerika pada 2018. Tahun 2019 senilai 41 juta dolar Amerika, bahkan tahun 2021 kenaikan ekspor melonjak tinggi menjadi 64 juta dolar Amerika. Ketika konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi tentu berdampak terhadap Indonesia dan Jawa Tengah sehingga nilai ekspor Jawa Tengah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Atas dasar hal tersebut penulis memiliki argumen penelitian bahwa kerjasama perdagangan Jawa Tengah dengan Rusia (B to B) menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian untuk menganalisis langkah Provinsi Jawa Tengah pada kerjasama *sister province* dengan Provinsi Sverdlovsk Rusia di masa konflik Rusia dengan Ukraina, dan apa saja dampaknya terhadap kerjasama tersebut.

1.8 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis data-data yang dikumpulkan. Hasil dari tipe penelitian ini bergantung dari fenomena sosial apa yang diteliti.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2008) penelitian digolongkan menjadi tiga (Singarimbun, 2008), yaitu:

1. Penelitian Eksploratif : Penelitian yang bersifat terbuka, yang berusaha untuk menelusuri atau menggali ada tidaknya suatu masalah atau ingin mengetahui

secara mendalam akan suatu masalah tertentu.

2. Penelitian Deskriptif : Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala sosial tertentu, dalam menghimpun fakta terdapat analisis tabel, analisis presentase, analisis deduktif-induktif, dan sebagainya.
3. Penelitian Eksploratori : Penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penelitian yang akan diajukan apakah diterima atau ditolak.

Dalam penelitian ini akan dijelaskan analisis dampak konflik Rusia dan Ukraina terhadap kerjasama perdagangan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Rusia.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis data-data yang dikumpulkan. Menurut Adiputra (2021), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas.

1.8.2 Situs Penelitian

Penulis mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara wawancara di Biro Pemerintahan, Otda, dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah serta dinas teknis lainnya dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkait melalui dokumen, web resmi, jurnal, dan kabar berita.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti untuk menganalisis penelitian ini berasal dari sumber-sumber dan literatur yang berkaitan, serta wawancara terkait pihak yang berpengaruh pada penelitian ini.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, menurut Sugiyono (2017) data jenis kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar. Dengan begitu, penelitian ini akan menganalisis dan menarik kesimpulan dari berbagai literatur dan hasil wawancara yang berkaitan dengan kerjasama perdagangan antara Jawa Tengah dengan Rusia, terutama saat era konflik antara Rusia dengan Ukraina.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2019), data primer adalah data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, dapat berupa web resmi, berita, ataupun jurnal-jurnal. Penulis mengumpulkan sumber-sumber untuk penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan staff dan pegawai yang berada di Biro Pemerintahan, Otda, dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah serta dinas teknis lainnya, serta meneliti web-web resmi dan situs yang berkaitan dengan langkah-langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan kerjasama perdagangan dengan Rusia.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat naratif. Pada analisis ini, peneliti memaparkan tulisan-tulisan yang disertai dengan menjabarkan kronologis waktu peristiwa yang berkaitan dengan topik yang diteliti.